

## DEMOKRASI SEBAGAI DASAR DAN NILAI-NILAI POLITIK SERTA PERMASALAHANNYA

Oleh

ADITYAWARMAN

Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik  
Universitas Galuh Ciamis

*Istilah demokrasi yang kita dengar dan kita kenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dirumuskan dengan baik dalam pelaksanaannya. Idea demokrasi yang pertama kali muncul di "Yunani Kuno" dapatlah dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam kegiatan kenegaraan. Apakah masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah menganut dan melaksanakan idea demokrasi? Pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.*

**Kata Kunci : Demokrasi, Nilai-Nilai Politik**

### PENDAHULUAN

Dalam sejarah politik, demokrasi dikatakan bahwa yang paling baik dan paling wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan dan yang berpengaruh.

Masalah demokrasi adalah bagaimana partisipasi masyarakat dijadikan pertimbangan dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Timbulnya masalah ini telah menjadi tuntutan baru di bidang politik bagi masyarakat. Sejarah perkembangan demokrasi pada awal pertumbuhannya mencakup beberapa asas dan nilai demokrasi yang telah diwariskan dari masa ke masa yaitu :

1. Demokrasi Yunani Kuno.
2. Kebudayaan Yunani Kuno.
3. Gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan dari aliran reformis.
4. Perang agama.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara City State Yunani Kuno ( abad ke 6 sampai abad ke 3 Sebelum Masehi ) merupakan demokrasi langsung (direct Democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat di selenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduknya sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota) lagi pula dalam ketentuan-ketentuan lain, demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas dari budak belian dan

pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan.

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan sudah hilang dari muka bumi. Dunia Barat pada waktu bangsa Romawi (yang sedikit banyak mengenal kebudayaan Yunani) dikalahkan oleh suku bangsa Erofa Barat dan benua Erofa memasuki abad pertengahan (600 – 400 Masehi). Abad pertengahan ini di cirikan oleh struktur sosial yang feodal yaitu kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama dan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu dengan lainnya.

Dilihat dari perkembangan demokrasi yang menghasilkan suatu dokumen yang sangat penting yaitu : Magna Charta ( Piagam Besar tahun 1215 Masehi) semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan raja John dari Inggris dimana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan Privileges dan bawahannya sebagai imbalan untuk menyerahkan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Walaupun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Demokrasi menurut Lord Acton (seorang ahli sejarah) memberi gagasan tentang kekuasaan dimana pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya mengingat pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya kemudian menjadi termashur yaitu :

"manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan

kekuasaan tersebut, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya”.

Gejala-gejala yang tidak sehat yang mengancam demokrasi dinegara kita yang baru saja merdeka (sampai saat ini masih mencari konsep demokrasi yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia) menunjukkan bahwa “demokrasi yang berkembang menjadi anarki dan akhirnya akan dikesampingkan oleh suatu diktator”. ( H.Roslan Anwar : 124).

Demokrasi baru dapat dilahirkan dan dipelihara jika ada kemampuan untuk hidup berdemokrasi. Demokrasi mempunyai dua sarat pokok yaitu :

1. Kemauan dan kesediaan untuk dapat menghormati hak-hak asasi manusia (khususnya para pemimpin-pemimpin rakyat an pemerintah).
2. Suatu struktur pemerintahan yang tidak monolitik (pemerintahan yang bertanggungjawab kepada dewan yang otonom yang mewakili rakyat dan adanya suatu aparat pengadilan yang otonom yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan *executive* dan *legislative*).

Kalau syarat-syarat di atas tidak ada, maka pemerintahan yang bersangkutan tidak dapat dinamakan demokratis. Demokratis dikaburkan dengan slogan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat hidup dalam sistem “ Demokrasi Parlemerter”, Demokrasi Terpimpin” ataupun “ Demokrasi Pancasila”, ini akan menjadi pertanyaan yang sanagat mendasar bagi bangsa kita yang masih samar-samar memaknai bagaimana praktek demokrasi di negara Indonesia ?

Demokrasi hanyalah suatu tuntutan (Demand) didalam kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu merupakan suatu bagian dari kepentingan (Interest) dan kebutuhan (Need) manusia. Kebutuhan itu sifatnya beraneka ragam, tidak satu dan kadangkala bertentangan. Sebagai contoh : golongan yang berpendapatan rendah menginginkan perbaikan penghasilan melalui peningkatan pajak dari golongan yang berpenghasilan tinggi. Dan tentunya tidak disukai oleh golongan yang berpenghasilan tinggi. Atau sebaliknya golongan yang berpenghasilan tinggi menginginkan perbaikan penghasilan melalui peningkatan pajak dari masyarakat yang berpendapatan rendah.

Begitulah kehidupan manusia, dia bergerak dari suatu kebutuhan ke kebutuhan yang lain. Tiada henti melahirkan konflik dan kerjasama antar individu atau golongan. Kepentingan dan kebutuhan itu melahirkan nilai-nilai politik berkaitan dengan cara bagaimana nilai-nilai ini dialokasikan didalam masyarakat.

Jika melihat peranan pemerintah sebagai lembaga politik terpenting yang mendapat legitimasi dari masyarakat untuk menampung aspirasi dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat, maka fungsi utama pemerintah adalah mengupayakan semaksimal mungkin terpenuhinya kebutuhan rakyatnya.

## PEMBAHASAN

### Harold Lasswel dan Nilai Dasar Demokrasi

Harold Lasswel ( 1958) menyatakan bahwa : politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana ? ( Who gets, what, when and how ?) dia menyatakan bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat 8 nilai dasar demokrasi utama yang selalu dipergunakan oleh masyarakat :

1. Kekuasaan (*Power*)
2. Peradaban/pencerahan (*enlightenment*)
3. Kesejahteraan (*Wealth*)
4. Kesehatan (*Health*)
5. Keterampilan/keahlian (*skill*)
6. Perhatian (*afection*)
7. Kebenaran, kepatuhan dan keadilan
8. Penghargaan (*Respect*)

Karl W.Deucht ( 1974) menambahkan dua nilai yaitu:

9. Keamanan
10. Kebebasan

Kesepuluh nilai yang dikemukakan oleh Lasswel dan Karl W. Deucht adalah nilai dasar yang diinginkan oleh setiap orang dalam suatu negara agar dipenuhi oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

### 1. Kekuasaan (*Power*)

Demokrasi berkaitan dengan bagaimana alokasi kekuasaan dibuat atau bagaimana kekuasaan terbagi dalam masyarakat. Sebagai nilai kunci dalam politik, bahwa kekuasaan dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan diri perilaku dan sebagai partisipasi dalam perumusan kebijakan.

Sistem politik demokrasi yakin bahwa seluruh warga negara semestinya mempunyai hak untuk menikmati kekuasaan dengan jalan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, misalnya : dalam proses perumusan kebijakan sebagai artikulasi kekuasaan, yang menjadi masalahnya adalah siapa saja dan siapakah warga negara yang secara nyata bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut ?

Untuk mengetahui seberapa jauh kelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan. Kita dapat mempelajari sistem politik Indonesia di masa orde baru dan pemilu tahun 1999 serta pemilu tahun 2004. Jika melihat perkembangannya, maka kekuasaan memberikan tempat kepada berbagai kelompok masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, dalam hal ini DPR dan DPRD merupakan lembaga yang paling tepat. Masalahnya adalah : bagaimana agar lembaga tersebut dapat berfungsi dan berperan secara wajar di dalam upaya menyuarakan kepentingan masyarakat ? sebab dengan timbulnya berbagai kritik terhadap DPR dan DPRD mengembangkan adanya ketidakpuasan atas peranan lembaga perwakilan tersebut. Tampaknya hingga saat ini hanya kepentingan aspirasi kepentingan kelompok kecil elite dan mereka yang memiliki akses terhadap penguasa saja yang diperhatikan sedangkan sebagian warga negara terlupakan.

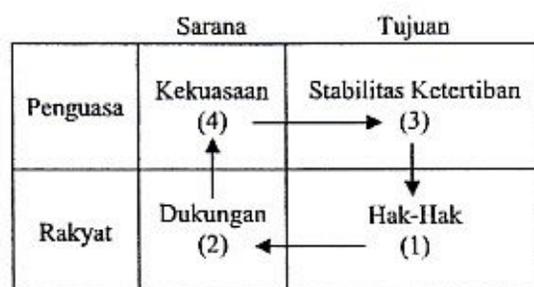
## 2. Peradaban/pencerahan (*Enlightenment*)

Social contract adalah suatu gagasan bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*Nature*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia. Hukum ini dinamakan *Nature Law*. Unsur universalisme ini yang ditetapkan pada masalah-masalah politik.

Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dengan rakyat didasari atas suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak ini memberi kekuasaan kepada raja untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasana yang alami dimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (*Natural Right*) dengan aman. Dilain pihak rakyat mentaati pemerintahan raja asal usaha untuk

mendobrak pemerintah yang absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat.

### Model Pencerahan (Kontrak Sosial)



## 3. Kesejahteraan (*Wealth*)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diatasi dan merupakan tugas pokok pemerintah untuk mengadakan program-program yang nyata untuk masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan orang akan semakin lebih bisa bersikap sabar dan arif dalam berhubungan dengan orang lain. Di bidang politik peningkatan kesejahteraan akan menumbuhkan sikap aparat pemerintah dan masyarakat yang semakin matang dan mandiri.

## 4. Kesehatan (*Health*)

Nilai ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai contoh bagaimana pemerintah Swedia dan Inggris yang memiliki GNP yang lebih rendah dari Amerika Serikat ternyata memiliki tingkat kesehatan penduduk yang lebih tinggi karena kedua negara ini memiliki program kesehatan sedangkan Amerika Serikat tidak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan kesehatan antara lain dengan pembangunan Puskesmas dan Posyandu ditiap daerah kecamatan serta program BPJS Kesehatan yang pada akhirnya meskipun arah kebijakan kesehatan sudah tepat akan tetapi jumlah dana untuk program kesehatan ini masih sangat minim sekali dan harus terus di tambah pula.

## 5. Keterampilan/Keahlian (*Skill*)

Masalah keterampilan dapat dikaitkan dengan masalah angkatan kerja yaitu :

1. Lapangan kerja masih belum mencukupi.
2. Ketidakseimbangan antara pekerja di sektor pertanian dan industri.
3. Mutu tenaga kerja

**4. Lemahnya posisi tenaga kerja**

Politik khususnya demokrasi memainkan peran yang penting dalam masalah keterampilan masyarakat hingga beberapa tahun yang lampau orang-orang negro di Amerika Serikat masih belum diperbolehkan untuk memasuki lapangan pekerjaan tertentu. Semakin tinggi tingkat keterampilan suatu bangsa semakin maju bangsa tersebut dan sebaliknya.

**6. Perhatian (*Afection*)**

Socrates menyatakan bahwa : perhatian (*afection*) merupakan basis dari semua politik dan diwujudkan dalam bentuk persahabatan dan kesetiakawanan serta persahabatan dan kesetiakawanan tidak dapat dibeli dengan uang atau melalui paksaan perhatian harus terbentuk secara sukarela dan hanya dapat dicapai dengan komunikasi yang baik, tolong menolong dan saling pengertian dan ini merupakan hasil yang sangat berharga dalam proses politik. Nilai sangat sukar untuk diukur secara kuantitatif karena berkaitan dengan emosi, tetapi dapat dirasakan. Fungsi perhatian sangat penting dalam upaya persatuan bangsa.

**7. Kebenaran, Kepatuhan dan Keadilan**

Nilai saling menghargai sangat berkaitan dengan nilai kebenaran dan nilai moral, nilai kebenaran ini dapat dilihat dalam suasana konflik dimana golongan yang lain merasa benar dan golongan yang lain dianggap salah. Dalam keadaan seperti ini akan terjadi konflik ideologi.

Nilai kebenaran jika dihubungkan dengan keadilan akan terasa sulit. Dimana keadilan diperlukan oleh semua orang untuk menumbuhkan rasa aman dan tenteram. Pemerintah yang adil adalah yang memperlakukan setiap orang secara sama tanpa memandang asal usul kelompok dan penghasilannya. Pada dasarnya semua yang ingin diperlakukan adil tetapi kadang-kadang timbul situasi dimana orang merasa "rugi" jikalau berlaku adil dan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak adil hanya karena ingin memperoleh imbalan materi atau takut kepada kekuasaan yang lebih besar. Dalam jangka panjang ketidakadilan akan menimbulkan perasaan tidak puas dan tidak percaya terhadap pemerintah dan tentunya akan mempengaruhi instabilitas politik.

**8. Penghargaan (*Respect*)**

Politik harus berupaya untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar individu, kelompok, suku, agama, ras serta hubungan antar bangsa. Semua harus melibatkan nilai saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Nilai ini dapat digunakan untuk memberikan prioritas terhadap tuntutan masyarakat serta memberikan perhatian terhadap keinginan masyarakat. Secara tidak langsung, nilai ini dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, idealnya tercipta saling menghargai. Hal ini dapat tercapai jika dalam masyarakat terdapat rasa aman, keadilan, persamaan serta kesejahteraan yang merata.

Untuk menumbuhkan "penghargaan" kita harus memberikan perhatian pada faktor pendidikan dan sumber daya politik birokrasi pemerintah. Dalam hal pendidikan, kebijakan pendidikan dapat diarahkan untuk menciptakan tekanan perhatian pada keseimbangan antara proses pendidikan dan proses pengajaran yaitu pembentukan dan pembinaan watak serta penguasaan ilmu.

Pendidikan bagi aparatus pemerintah ditekankan pada kesadaran mengenai fungsi pelayanan birokrasi agar dalam jangka panjang rakyat dapat mempercayai dan menyukai aparat birokrasi. Birokrasi yang tergantung hidupnya pada dukungan masyarakat pada umumnya bersikap tanggap dan sebaliknya jika rakyat tidak memiliki posisi tawar menawar, birokrasi cenderung tidak tanggap.

**9. Keamanan**

Keamanan diperlukan oleh semua nilai-nilai demokrasi dan nilai ini dibutuhkan untuk menjaga pemanfaatan nilai-nilai yang lain. Jika suatu masyarakat sedang menikmati suatu nilai tertentu misalnya kemakmuran mereka ingin terus menerus menikmati kekuasaan kemakmuran tersebut. Untuk itu mereka memerlukan penjagaan yaitu keamanan. Selain itu rasa aman tidak timbul dari adanya gangguan keamanan tetapi juga dari kepastian hukum dan tertib administrasi yang berhubungan dengan pelayanan birokrasi terhadap publik. Jadi keamanan dan rasa aman bagi masyarakat adalah nilai yang penting karena tingkat keamanan yang tinggi menghasilkan perasaan yang tenteram.

Keamanan ini merupakan usaha dari politik untuk mencapainya.

#### 10. Kebebasan

Pada masa lampau kebebasan diartikan secara negative yaitu : tiada batasnya. Pada akhir abad ke 19 kebebasan telah diartikan secara positive dimana Karl W. Deutsch memberikan batasan yang positif sebagai berikut :

1. Adanya kesempatan yaitu tidak dilarangnya melakukan kegiatan jika ingin mendapat dan mengambil manfaat dari kebebasan yang tersedia.
2. Spontanitas atau keterusterangan yaitu tiadanya kendala untuk menyatakan pendapat secara terus terang tanpa melupakan aspek sopan santun.

Menurut Hegel kebebasan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kapasitas atau kemampuan untuk bertindak yaitu kemampuan yang memiliki prasyarat dan motivasi.
2. Tersedianya pilihan yaitu : masyarakat boleh melakukan pilihan dan harus diberi alat agar mampu memilih dan dengan sendirinya kemakmuran serta kesempatan untuk memperoleh informasi dan pendidikan.

#### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Kehidupan politik mempunyai tujuan yaitu tercapainya kebutuhan dasar manusia yang dijabarkan dalam nilai-nilai demokrasi.
2. Keinginan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi tersebut harus diupayakan oleh semua masyarakat Indonesia demi tercapainya kebutuhan dasar masyarakat.
3. Demi tercapainya kebutuhan dasar manusia tersebut memerlukan usaha-usaha yang kuat dan sungguh-sungguh serta terus-menerus dan usaha itu ditujukan pada bagaimana mengisi sistem politik kemasadepan yang lebih kompleks dengan permasalahan kebutuhan masyarakat.
4. Dinamika sistem politik adalah bagaimana mengoreksi pemerintah jika memang perlu diadakan koreksi maka koreksi tersebut untuk penyempurnaan dan bukan untuk merusak tatanan yang sudah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harold Lasswell, 1958, *Politics : who, gets, what, when how ?* cleveland, world Publishing Co.
- Karl W. Deutsch, 1970 *Politics and Government, how people Decide Their Fate*, Boston Houston Miffin Co.
- H. Rosihan Anwar, 1980, *Mengenal Sjahrir*, P.T Gramedia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. gramedia, Jakarta
- Davis E. After 1988 *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta

